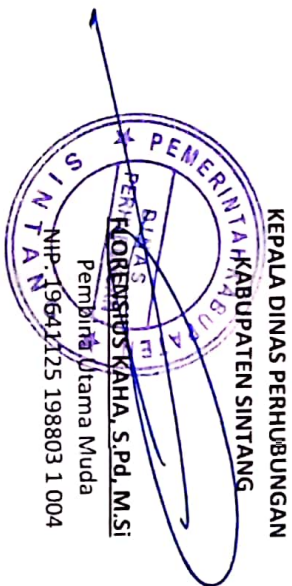


**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
1					
1.	Data pribadi pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap datanya
2.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h PP No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Kerahasian data pribadi pegawai tetap terjaga	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap datanya
3.	Data gaji, potongan gaji dan honor	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia data pribadi pegawai	Kerahasian data pribadi pegawai tetap terjaga	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap datanya
4.	Disposisi Dinas yang bersifat rahasia	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat Mengungkap Kerahasian Dokumen/Surat	Melindungi kerahasian dokumen/surat	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
5.	Arsip dinamis yang bersifat rahasia	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan surat badan publik yang sifatnya rahasia oleh pihak lain	Melindungi kerahasian dokumen/surat	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
6.	Laporan keuangan sebelum di audit	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

7.	Data Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Menghambat proses penegakan hukum/disiplin PNS	Memperlancar Proses Penegakan hukum/disiplin PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap datanya
8.	Data Identitas PNS yang mengajukan perceraian dan perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memberikan perlindungan data pribadi PNS dari penyalahgunaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap datanya
9.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena akan menimbulkan penilaian tidak objektif	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
10.	Dokumen Pengadaan / Pemeriksaan Barang dan Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena akan menimbulkan penilaian tidak objektif	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
11.	SPK yang masih dalam proses	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat Mengungkap Kerahasiaan Dokumen/Surat dan bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen/surat	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
12.	Data Aset Daerah yang menjadi tanggungjawab OPD	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat Mengungkap Kerahasiaan Dokumen/Surat	Melindungi kerahasiaan dokumen/surat	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

13.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat Mengungkap Kerahasiaan Dokumen/Surat dan bila disalahgunakan dapat menghambat pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen/surat dan Mendukung Proses Pengambilan Kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
-----	---	---	---	---	--

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

BLAS TI
FLORENTIUS KAHHA, S.Pd, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NRP. 19641125 198803 1 004